



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN V  
TAHUN SIDANG 2022-2023**

**KAMIS, 13 JULI 2023**

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan.*

**Yang kami hormati:**

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Sejak tanggal 16 Mei 2023, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan telah melaksanakan masa sidang untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi, DPR RI berupaya memenuhi penyelenggaraan pemerintahan negara yang dapat memberikan kehidupan dan penghidupan rakyat yang semakin sejahtera.

Membangun Indonesia, sebagai negara yang besar dan majemuk, membutuhkan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa.

Berbagai agenda pembangunan nasional yang dilakukan saat ini, selalu menjadi perhatian dan komitmen DPR RI, melalui fungsi konstitusionalnya, untuk dapat mempercepat kemajuan di segala bidang.

Pada masa sidang ini, upaya-upaya DPR RI untuk mempercepat kemajuan tersebut antara lain: bersama Pemerintah telah menetapkan Undang Undang tentang Kesehatan, menetapkan Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai Usul Inisiatif DPR RI, serta merumuskan kebijakan-kebijakan fiskal untuk APBN Tahun Anggaran 2024 yang berbasis pada kesejahteraan rakyat.

Kehadiran Undang Undang Kesehatan yang baru, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI, merupakan upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam Masa Persidangan ini, DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI telah memprioritaskan pembahasan 13 (*tiga belas*) Rancangan Undang Undang yang saat ini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan Rancangan Undang Undang lainnya yang masuk dalam Prolegnas Rancangan Undang Undang Prioritas Tahun 2023.

Walaupun dalam setiap pembahasan membentuk Undang Undang, selalu terdapat dinamika perbedaan pandangan, DPR RI memiliki komitmen untuk mengutamakan keberpihakan kepada kepentingan rakyat serta kepentingan nasional.

DPR RI bersama Pemerintah juga telah menyepakati kebijakan fiskal tahun 2024 mendatang diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arah kebijakan ini juga merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025 hingga 2029.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia sudah cukup terjaga di tengah berbagai gejolak perekonomian dunia. Indikator pertumbuhan ekonomi Indonesia dan

inflasi saat ini, menunjukkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terbaik di antara negara-negara ASEAN dan G20.

DPR RI mengapresiasi kerja Pemerintah dalam mengoptimalkan peran APBN, dan DPR RI akan terus mendorong agar pengelolaan APBN terus ditingkatkan untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berbagai kesepakatan, rekomendasi, dan catatan dalam pembicaraan pendahuluan pada masa sidang ini, akan menjadi acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2024 yang akan disampaikan pada bulan Agustus nanti.

DPR RI akan terus mencermati agar Nota Keuangan dan APBN Tahun 2024 benar-benar diarahkan sebagai anggaran berbasis kesejahteraan rakyat.

Pada masa persidangan ini, DPR RI juga telah menerima Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022.

Rancangan tersebut akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. DPR RI akan memastikan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022 telah dijalankan secara efisien, transparan, dan akuntabel oleh Pemerintah.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada masa persidangan ini DPR RI melalui Tim Pengawas Haji DPR RI telah melaksanakan fungsi pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji.

Meskipun secara umum kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun ini telah cukup baik, namun DPR RI

berharap Pemerintah dapat terus meningkatkan layanan, terutama yang terkait dengan pemondokan, katering, transportasi, dan kesehatan, sehingga pada masa mendatang seluruh calon jemaah haji dapat melaksanakan ibadah secara lebih aman dan nyaman.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui rapat-rapat bersama mitra kerja, panja-panja yang dibentuk oleh Alat Kelengkapan Dewan, telah memberikan perhatian dan rekomendasi atas berbagai permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

1. Potensi serangan siber yang dapat menyebabkan kebocoran sekaligus manipulasi data;
2. Pemanfaatan dana APBN untuk percepatan pembangunan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota;
3. Permasalahan pengalihan atau pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan



Perjanjian Kinerja (P3K) sebelum 28 November 2023;

4. Mafia tanah dan penyelesaian permasalahan sengketa tanah;
5. Pembangunan infrastruktur Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL);
6. Pelanggaran sumber daya kelautan perikanan, termasuk penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
7. Percepatan penyelesaian Lapangan Abadi LNG Blok Masela;
8. Penyerapan tenaga kerja lokal dalam pengembangan kawasan wisata;
9. Sarana dan prasarana penunjang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai keterwakilan 30% perempuan;
11. Rencana kebijakan Pemerintah terkait remunerasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di samping itu, pada masa persidangan ini DPR RI telah melakukan uji kelayakan terhadap:

1. Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan periode 2023-2028;
2. Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia periode 2023-2028;
3. Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028; dan
4. Calon Duta Besar Negara Sahabat.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kerangka aktivitas diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI telah menyelenggarakan berbagai kegiatan sidang antarparlemen di tingkat ASEAN dalam rangkaian posisi DPR RI sebagai presidensi pada AIPA, seperti Sidang AIPACODD dan Sidang WAIPA.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi awal yang baik menuju Sidang Umum ke-44 AIPA yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 5-10 Agustus 2023.

Selain itu, DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *MIKTA Speakers Consultation* ke-9 sekaligus menandai keketuaan DPR RI pada forum ini.

Pada rangkaian diplomasi lainnya, DPR RI telah menerima kunjungan istimewa Presiden Republik Islam Iran, Yang Mulia Seyyed Ebrahim Raisi pada tanggal 23 Mei yang lalu.

Sebaliknya, kunjungan diplomasi juga dilakukan oleh DPR RI ke sejumlah negara sahabat dalam kerangka penguatan hubungan bilateral, antara lain ke parlemen negara Uni Emirat Arab, Suriah, Malaysia, Papua Nugini, dan Mesir.

Kunjungan diplomasi parlemen juga dilakukan ke Lebanon dalam rangka memperkuat hubungan diplomatik Indonesia-Lebanon yang telah berlangsung selama 70 tahun sekaligus menyampaikan dukungan bagi penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri Lebanon.

DPR RI turut mengapresiasi kerja keras pemerintah atas kinerja diplomasi Indonesia pada tahun 2023 dalam rangka mendorong upaya diplomasi bagi kepentingan nasional.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan merupakan sarana bagi rakyat Indonesia untuk menentukan arah masa depan bangsa.

- **Demokrasi adalah alat, pemilu adalah alat, bahwa rakyat sejahteralah tujuannya,**

- **Bahwa masyarakat adil dan makmurlah tujuannya;**
- **Bahwa rakyat sentosalah tujuannya;**
- **Bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya.**

Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah, menjadi kepingan kepingan sosial dengan penuh sakwa sangka.

Fondasi utama kita membangun negeri adalah persatuan rakyat. Tanpa persatuan rakyat, sulit kiranya Bangsa Indonesia bisa mencapai kemajuan.

Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila.

Marilah kita jalankan pelaksanaan demokrasi, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, dengan menciptakan situasi yang riang gembira, dan tetap dalam persatuan Indonesia.

**Sidang Dewan yang Terhormat,**

Akhirnya, Saya atas nama Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI yang terus bekerja menjalankan kedaulatan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Om shanti shanti shanti om.*

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.**

**Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI**

## **LAMPIRAN:**

- **RUU yang telah selesai dibahas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023:**
  - Rancangan Undang Undang tentang Kesehatan
  
- **RUU Usul Inisiatif DPR RI:**
  - Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  
- **RUU dalam Pembahasan Tingkat I:**
  1. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
  2. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;



3. Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Rancangan Undang Undang tentang Hukum Acara Perdata;
5. Rancangan Undang Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
6. Rancangan Undang Undang tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
7. Rancangan Undang Undang tentang Pendidikan Kedokteran;
8. Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
9. Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri;
10. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

11. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence);
12. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);
13. Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).

- **Anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang terpilih Periode 2023-2028:**
  - Slamet Edy Purnomo
  
- **Calon Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) Periode 2023-2028:**
  1. Irwan Lubis;
  2. Agus Herta Sumarto;
  3. Mohamad Khusaini;
  4. Iskandar Simorangkir;
  5. Muhammad Nawir Messi;
  6. Piter Abdullah Redjalam;
  7. Marwanto Harjowiryono.
  
- **Calon Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan periode 2023-2028:**
  1. Agusman;
  2. Hasan Fawzi.
  
- **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

1. Sidang *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development* pada 16-17 Mei 2023 di Manama, Bahrain;
2. Diskusi Virtual bertajuk “*Shout Out to Changemakers*” diselenggarakan oleh *Inter-Parliamentary Union (IPU)* pada 24 Mei 2023;
3. Sidang ke-6 *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council of Dangerous Drugs (AIPACODD)* pada 30-31 Mei 2023 di Bogor, Jawa Barat;
4. *Coordinating Committee of WAIPA* pada 4-7 Juni 2023 di Padang, Sumatera Barat;
5. Kegiatan *The League of Parliamentarians for Al Quds (LP4Q)* pada 6-8 Juni 2023 di Kuala Lumpur, Malaysia;
6. *Women Political Leader Summit* bertajuk “*Representation Matters*” pada 7-8 Juni 2023 di Brussel, Belgia;

7. Sidang *The League of Parliamentarians for Al Quds* pada 6-8 Juni 2023 di Malaysia;
8. *The Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Working Together to Our Common Future* pada 13-15 Juni 2023 di Marrakesh, Maroko;
9. Workshop “*Developing Recommendations to the 44th General Assembly of AIPA*” pada 20 Juni 2023 di Bogor, Jawa Barat.